

ANALISIS KESIAPAN MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN KAWASAN WISATA PASIR TUMA DI DESA MEKARSARI KECAMATAN CIBATU KAB. GARUT

Gozaly Reinaldy

Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

gozalyreinaldynasr@gmail.com

Abstract— Achieving an Independent Village requires a sustainable development framework that takes into account social (IKS), economic (IKE), and ecological or environmental (IKL) aspects. Mekarsari Village is planning to reach an independent village planning the construction of the Pasir Tuma tourist area in 2020. However, in the planning there are still problems, namely the unpreparedness of the community and village officials in the development planning process. This study aims to see, measure, study and formulate strategies for handling the level of community readiness in the development of the Tuma Pasir tourism area. The method used is descriptive analysis with a quantitative approach. Data collection was carried out through questionnaires to key respondents. Techniques for measuring community readiness consisted of No awareness, Denial / Resistance, Vague awareness, Preplanning, Preparation, Initiation, Stabilization, Expansion / Confirmation, Community Ownership. The results showed the level of community readiness in the development of the tuma sand tourism area in Mekarsari Village using 5 dimensions of readiness, namely the average readiness of the community in the construction of the tuma sand tourism area at a score of 3.6 or at the (Initiation) stage. The strategy for handling the level of readiness using quantitative SWOT analysis obtained the S-O (Strength-Opportunity) strategy.

Keywords— *Independent Village, Pasir Tuma, Readiness Stage, SWOT Analysis*

Abstrak— Mencapai Desa Mandiri perlu adanya kerangka kerja pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan aspek sosial (IKS), ekonomi (IKE), dan ekologi atau lingkungan (IKL). Desa Mekarsari dalam perencanaan mencapai desa mandiri merencanakan pembangunan kawasan wisata Pasir Tuma pada tahun 2020. Namun dalam perencanaannya masih terdapat masalah, yaitu adanya ketidaksiapan masyarakat serta aparat desa dalam proses perencanaan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengukur, mengkaji serta merumuskan strategi penanganan tingkat kesiapan masyarakat dalam pembangunan kawasan wisata pasir tuma, Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner kepada responden kunci Teknik pengukuran kesiapan masyarakat terdiri dari No awareness, Denial/Resistamce, Vague awareness, Preplanning, Preparation, Initiation, Stabilization, Expansion/Confirmation, Community Ownership. Hasil Penelitian menunjukkan tingkat kesiapan masyarakat dalam pembangunan kawasan wisata pasir tuma di Desa Mekarsari dengan menggunakan 5 dimensi kesiapan yaitu rata-rata kesiapan masyarakat dalam

pembangunan kawsan wisata pasir tuma pada skor 3.6 atau pada tahap (Initiation). Strategi penanganan tingkat kesiapan menggunakan analisis SWOT kuantitatif diperoleh strategi S-O (Strength-Opportunity).

Kata Kunci— *Desa Mandiri, Pasir Tuma, Tahap Kesiapan, Analisis SWOT*

I. PENDAHULUAN

Kemandirian desa dijelaskan dengan klasifikasi yang diharapkan dapat memfasilitasi pemahaman tentang situasi dan kondisi desa saat ini, serta bagaimana langkah kebijakan yang harus dikembangkan untuk mendukung peningkatan kehidupan desa menjadi lebih mandiri. Desa untuk mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial (IKS), ekonomi (IKE), dan ekologi atau lingkungan (IKL) menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi dan kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa. Klasifikasi tersebut tentu harus peka terhadap karakteristik desa yang senyatanya sangat beragam, bukan hanya dari segi fisik geografis tetapi juga terkait nilai-nilai, budaya dan tingkat prakarsa masyarakat desa (Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, 2020).

Dalam merealisasikan Kemandirian desa, perlu peran dari berbagai lini termasuk masyarakat intelektual perguruan tinggi. Kehadiran perguruan tinggi diharapkan memiliki peran yang aktif dalam proses pemberdayaan masyarakat desa untuk menuju kemandirian desa, dengan peran yang tepat sesuai kebutuhan dan karakteristik masyarakat di setiap wilayah desa (Atih, 2009:144). Program Studi Ekonomi Pembangunan (EP) Universitas Islam Bandung (UNISBA) mengambil peran dalam pengabdian kepada masyarakat dengan mengadakan program Kuliah Kerja Lapangan yang diikuti kurang lebih 80 Mahasiswa pada tahun 2019 serta kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang berlokasi di Desa Mekarsari Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat yang juga merupakan desa binaan Prodi EP sejak tahun 2018.

Menurut Data Indeks Desa Membangun (IDM) 2020 Desa Mekarsari memiliki Status Berkembang dengan nilai IDM 0.6089 dengan penjabaran Indeks Komposit Sosial (IKS) 0.7600 Indeks Komposit Ekonomi 0.6000 Indeks Komposit Lingkungan 0.4667 padahal pada data IDM 2016

Desa Mekarsari berstatus maju dengan nilai IDM 0.7294, dari data tersebut terlihat bahwa Desa Mekarsari mengalami penurunan nilai IDM terlebih lagi ada pada aspek Ekonomi dan ekologi padahal dari hasil KKL serta survey pendahuluan yang telah dilakukan Desa Mekarsari memiliki banyak potensi sumber daya yang melimpah yang dapat dikembangkan untuk mencapai kemandirian desa (Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, 2020). Dari data yang menunjukkan penurunan nilai IDM Desa Mekarsari, Pemerintah desa dengan tujuan mengembalikan status dari desa berkembang ke maju hingga bahkan menjadi desa mandiri telah membuat kebijakan dengan berencana membangun badan usaha milik desa (BUMDesa) berupa Kawasan Wisata Pasir Tuma, dilihat dari RKPDes serta dari hasil survey pendahuluan dalam beberapa diskusi bahwa pemerintah Desa Mekarsari telah mencantumkan Kawasan Wisata Pasir Tuma di RKPDes 2020 yang telah dianggarkan sebesar 300 jt.



Sumber : Google Earth (di olah)

Gambar 1. 1. Hasil Pemetaan Tim PKM Prodi EP dengan Aparat Pemerintah Desa Mekar Sari Mengenai Kawasan Wisata Pasir Tuma

Hasil pemetaan diatas dibuat dengan melihat potensi yang dimiliki oleh desa yaitu lokasi strategis karena berada di sebelah utara desa dan dilewati oleh jalan nasional serta adanya sungai cimanuk yang menjadi atraksi serta daya tarik utama dari Kawasan Wisata Pasir Tuma. Dari hasil KKL Prodi EP pada tahun 2019 ditemukan bahwa Desa Mekarsari memiliki Potensi yang bisa menjadi ciri khas dari desa antara lain, di Kampung Pesantren RW.09 Desa Mekarsari memiliki industri rumahan dengan komoditi dompet, dan di beberapa kampung memiliki pengerajin anyaman bambu. Dengan menggabungkan potensi yang ada dan dikembangkan dengan pengelolaan yang baik akan membantu Desa Mekarsari dalam peningkatan status desa.

Serta pihak pemerintah yang belum mengerti bagaimana seharusnya aturan pemanfaatan Sungai Cimanuk yang merupakan barang publik (*Public Goods*) yang berbatasan dengan kecamatan lain dan akan digunakan oleh Desa Mekarsari, sementara selama ini di Sungai Cimanuk sudah ada aktifitas ekonomi seperti penambangan pasir. Hal

tersebut dikhawatirkan bahwa hal tersebut akan dapat memunculkan konflik bagi kelangsungan kawasan wisata ini. Melihat bentuk geografis Kawasan Pasir Tuma yang begitu curam dan sangat rawan terjadinya bencana alam, bagaimana pihak Desa Mekarsari dalam mengantisipasi bencana untuk meningkatkan aspek ekologi. Anggaran yang telah ditetapkan untuk pembangunan Kawasan Wisata Pasir Tuma telah direlokasi seluruhnya untuk penanganan dampak pandemi *Covid-19* kepada masyarakat. Padahal keberadaan Kawasan Wisata Pasir Tuma tersebut diharapkan dapat mendorong perekonomian masyarakat di Desa Mekarsari.

Berdasarkan fenomena diatas penulis tertarik untuk menganalisis seberapa jauh tingkat kesiapan aparat dan masyarakat dalam pembentukan Kawasan Wisata Pasir Tuma di Desa Mekarsari Kecamatan Cibatubur Kab. Garut.

II. LANDASAN TEORI

Desa merupakan satu kesatuan hukum yang menjadi tempat tinggal masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri (Rizka, 2013). Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, "Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa desa merupakan kesatuan hukum yang memiliki batas wilayah tertentu yang memiliki hak untuk mengurus pemerintahan sendiri dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Pembangunan desa merupakan suatu upaya yang dilakukan demi peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat di suatu daerah dimana pembangunan desa dilakukan oleh seluruh lapisan baik pemerintah maupun masyarakat. Pembangunan desa yang diprogramkan oleh negara (pemerintah dan masyarakat) dengan mengerahkan kemampuan yang dimiliki untuk membangun potensi desa. Pembangunan desa merupakan kewajiban dan tanggung jawab politis negara dalam usaha memecahkan masalah sosial ekonomi Negara (Dharmanu, 2017).

Kewajiban desa dalam pembangunan harus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan muara pada kemandirian desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 Merupakan proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Pemerintah dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Desa.

Pembangunan yang partisipatif mengutamakan pembangunan yang dilakukan dan dikelola langsung oleh masyarakat. Pembangunan ini menekankan pada upaya pengembangan kapasitas masyarakat dalam bentuk

pemberdayaan masyarakat. Pembangunan dapat disebut pembangunan partisipatif apabila dikelola langsung oleh masyarakat yang bersangkutan untuk mendorong masyarakat mengerahkan kemampuan serta potensinya demi keberhasilan suatu pembangunan dengan tujuan dalam peningkatan kapasitas masyarakat untuk mencapai kemandirian desa (sutami, 2009: 14).

Perencanaan pembangunan desa meliputi rencana kegiatan dalam rangka pengendalian dan pembinaan di tingkat Kabupaten dan Kecamatan, serta penyusunan rencana lokasi dan alokasi dana. Dalam rangka pengintergrasian perencanaan pembangunan dalam sistem pembangunan daerah, maka desa perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa, berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) lalu Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 79 Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka, meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
2. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Indeks Desa Membangun mengklasifikasi desa dalam lima status, yakni: (a). desa sangat tertinggal, (b). desa tertinggal, (c). desa berkembang, (d). desa maju, dan (e). desa mandiri. Klasifikasi desa tersebut untuk menunjukkan keragaman karakter setiap desa dalam rentang skor 0,27 hingga 0,92. Klasifikasi status desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:

1. Desa Sangat Tertinggal : $\leq 0,491$
2. Desa Tertinggal : $> 0,491$ dan $\leq 0,599$
3. Desa Berkembang : $> 0,599$ dan $\leq 0,707$
4. Desa Maju : $> 0,707$ dan $\leq 0,815$
5. Desa Mandiri : $> 0,815$

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam menggerakkan perekonomian Indonesia dan menjadi bagian dari perekonomian global. Berlangsungnya revolusi 3T, transport, telecommunication, tourism, menunjukkan bahwa kegiatan pariwisata telah menjadi salah satu kekuatan yang mampu mempercepat penyatuan dunia dalam integrasi ekonomi dan pergerakan manusia lintas daerah dan bahkan lintas negara (Rusman, 2004).

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha. Peranan pariwisata sendiri yaitu sektor yang bisa menunjang kemajuan suatu daerah, terutama dengan adanya peraturan mengenai otonomi daerah. Kebijakan ini diberlakukan atas dasar masyarakat daerah yang memiliki modal yang dapat diandalkan untuk kemajuan daerahnya, salah satunya dengan kegiatan pariwisata (Aulia, 2020).

Untuk tahun 2020 sektor pariwisata Indonesia mengalami guncangan akibat adanya pandemic covid-19 namun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menyiapkan kebijakan untuk standar suatu kawasan wisata pada tahun ini dengan meluncurkan sertifikasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Environment sustainability) yang adalah proses pemberian sertifikat kepada Usaha Pariwisata, Destinasi Pariwisata, dan Produk Pariwisata lainnya untuk memberikan jaminan kepada wisatawan terhadap pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan.

Sertifikasi dilakukan oleh Kemenparekraf yang bekerjasama dengan Kemenkes dan beberapa Aosisasi (PHRI, ASITA, GPI). Dengan adanya sertifikasi ini membantu setiap Usaha Pariwisata, Destinasi Pariwisata, dan Produk Pariwisata lainnya untuk memiliki standar dalam pembentukan maupun pengelolaan. (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2020).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Skala pengukuran yang digunakan adalah 1-5 untuk mengetahui tingkat kesiapan masyarakat yang mengacu pada penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, *range* untuk menentukan tingkat kesiapan masyarakat juga telah disesuaikan dengan skala yang digunakan, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1

TABEL 4. 1 PENENTUAN TINGKAT KESIAPAN MASYARAKAT

No	Stage	Range
1	<i>No awareness</i>	1.0-1.4
2	<i>Denial/Resistance</i>	1.5-1.9
3	<i>Vague Awareness</i>	2.0-2.4
4	<i>Preplanning</i>	2.5-2.9
5	<i>Preparation</i>	3.0-3.4
6	<i>Initiation</i>	3.5-3.9
7	<i>Stabilization</i>	4.0-4.4
8	<i>Confirmation/Expansion</i>	4.5-4.9
9	<i>High Quality of Community Ownership</i>	5.0-5.4

Sumber : Febriyanti, 2015

Readiness stage per dimensi diperoleh dari hasil perhitungan rata-rata dari semua skor dengan jumlah dimensi. Rata-rata tersebut didapatkan dengan membagi total skor dengan jumlah dimensi. Untuk hasil perhitungan

readiness stage per dimensi Desa Srirahayu dapat dilihat di Tabel 4.2 berikut

Analisis ekonomi di bab ini akan menjelaskan mengenai arti dari parameter-parameter yang diperoleh dari hasil regresi, meliputi arah parameter yang diteliti berdasarkan teori ekonomi, termasuk arti dari koefisien itu sendiri, dan juga melihat pengaruh perubahan variabel bebas dan variabel terikatnya. Sedangkan untuk analisis statistik akan dilihat sejauh mana validitas model yang digunakan dalam penelitian melalui pengujian secara statistik terhadap hasil regresi model yang bersangkutan antara lain dengan memperhitungkan besaran statistik yaitu R^2 , t-statistik, F-statistik, uji multikolinier, uji heterokedastis, uji autokorelasi, uji linearitas, dan uji normalitas.

TABEL 4. 2 READINESS STAGE PER DIMENSI DESA MEKARSARI

No	Dimensi	Skor	Readlines Stage
1	Pengetahuan Masyarakat	3.7	<i>Initiation</i>
2	Kepemimpinan	3.4	<i>Preparation</i>
3	Iklim Masyarakat	3.9	<i>Initiation</i>
4	Pengetahuan Masyarakat Tentang Isu	3.6	<i>Initiation</i>
5	Sumber daya	3.6	<i>Initiation</i>
Total		18.2	
Rata-rata		3.6	<i>Initiation</i>

Sumber: Data Diolah, 2020

Dari tabel 4.2 mengidentifikasi bahwa *readiness stage* Kesiapan masyarakat dalam pembangunan Kawasan Wisata Pasirtuma pada skor 3.6 yaitu *Initiation*. dengan dimensi dengan skor tertinggi ada pada Iklim Masyarakat, sedangkan Skor terendah ada pada dimensi kepemimpinan. Pada tahap ini Sudah banyaknya penduduk yang pernah mendengar mengenai Pembangunan Kawasan Wisata Pasir Tuma dan paham tentang tujuan program tersebut. Setidaknya penerima manfaat dan bagaimana pembangunan memberi manfaat. Berdasarkan penjelasan setiap tahap kesiapan masyarakat, tahap *Initiation* memiliki arti sebagai berikut:

1. Penduduk memainkan peran kunci dan berpartisipasi dalam Pembangunan Kawasan Wisata Pasir Tuma saat ini dan mengembangkan, meningkatkan, serta menerapkan salah satunya dengan menjadi anggota kelompok atau berbicara secara terbuka mendukung upaya, dan/atau

menggunakan kekuatan lainnya. Dan sedikitnya beberapa tokoh masyarakat memainkan peran kunci dan berpartisipasi dalam Pembangunan Kawasan Wisata Pasir Tuma saat ini dan mengembangkan, meningkatkan, serta menerapkan salah satunya dengan memimpin kelompok atau berbicara secara terbuka mendukung upaya, dan/atau menggunakan kekuatan lainnya.

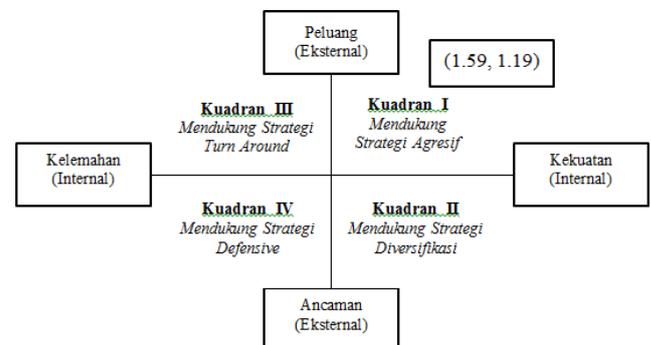
2. Ada beberapa penduduk yang tahu banyak tentang Pembangunan Kawasan Wisata Pasir Tuma, mengapa perlu melakukan Pembangunan Kawasan Wisata Pasir Tuma untuk tujuan peningkatan PAD, apa konsekuensinya dan program tersebut diimplementasikan di daerah sekitarnya termasuk dampaknya pada masyarakat.
3. Sumber daya baru telah diperoleh atau dialokasikan untuk mendukung upaya untuk mengatasi masalah ini lebih lanjut.

Formulasi dan Pemilihan Strategi

Dalam penelitian ini, strategi dipilih dan diformulasikan berdasarkan skor yang diperoleh dari hasil perkalian antara bobot dan rating yang diperoleh dari informan kunci. Hasilnya, faktor kekuatan (S) dan peluang (O) memiliki skor lebih tinggi dibandingkan dengan faktor kelemahan (W) dan ancaman (T). Matriks SWOT dalam analisis ini dibagi dua, yaitu:

Analisis IFAS (*Internal Strategic Factors Summary*) menunjukkan bahwa skor total hasil analisis internal adalah 2.39 dengan kekuatan paling tinggi ada pada Tingkat Dukungan Masyarakat kepada pembangunan kawasan wisata Pasir Tuma dengan skor 0.77 sementara untuk Kelemahan ada di Penyebaran Informasi yang kurang baik mengakibatkan informasi yang harus masyarakat ketahui tidak diketahui dengan nilai skor 0.22.

Analisis EFAS (*External Strategic Factors Summary*) bahwa faktor eksternal mempunyai nilai 2.50 dengan peluang paling tinggi yaitu Perkembangan IPTEK untuk membuat peningkatan kesiapan masyarakat dalam pembangunan kawasan wisata Pasir Tuma dengan Skor 0.98 dan untuk ancaman ada di Ketidakpastian tentang keberlanjutan pembangunan karena terpotong pandemi covid-19 dengan skor 0.35.



Sumber: Data Diolah, 2020.

Gambar 4. 2 Analisis SWOT

Implikasi Strategi S-O (Strength-Opportunity)

Berdasarkan hasil analisis dengan matriks SWOT sebelumnya yang menghasilkan strategi S-O sebagai strategi progresif yang optimal, maka perlu adanya perencanaan-perencanaan yang terfokus terhadap strategi-strategi hasil kombinasi faktor *strength* dan *opportunity* tersebut tanpa melupakan kombinasi strategi-strategi lainnya. Strategi S-O (*Strength-Opportunity*) antara lain, sebagai berikut :

1. Dengan dukungan dari masyarakat pemerintah menyebarkan informasi untuk mengedukasi masyarakat sebelum pembangunan dilaksanakan kembali.

Sejak adanya Pandemi dan diberhentikannya pembangunan kawasan wisata Pasir Tuma ini bisa menjadi kesempatan untuk pemerintah melakukan edukasi kepada masyarakat dengan menyebarkan informasi yang jelas terkait tujuan, manfaat, dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kawasan wisata Pasir Tuma ini. Serta untuk menghilangkan kecurigaan warga terhadap pemerintah desa sebaiknya melakukan keterbukaan data baik masalah dana dan konsep dari pembangunan kawasan wisata pasir tuma ini.

Penyebaran Informasi yang dilakukan dapat dengan cara membuat baliho ataupun spanduk (untuk mengjindari pertemuan langsung) bahwa pembangunan kawasan wisata pasir tuma masih terus akan dilakukan dan menjadi fokus utama di tahun 2020 ataupun menggunakan media elektronik seperti pengumuman *broadcast* lewat aplikasi *whatsapp*, dan menggunakan media elektronik lainnya.

Penyebaran informasipun bisa dilakukan melalui RT, RW, dan Tokoh masyarakat tetapi harus jelas informasinya bagaimana arah pembangunan, bagaimana masalah sumberdaya, modal dan lebih baik ada dokumen perencanaanya agar menghindari *disinformasi*.

2. Aparatur desa dengan lembaga-lembaga desa melakukan pengkajian kembali perencanaan pembangunan demi peningkatan kesiapan masyarakat.

Ditengah – tengah pandemi ini melakukan pengkajian ulang terkait perencanaan pembangunan harus dilakukan untuk peningkatan persiapan masyarakat agar ketika pembangunan akan dimulai kembali telah memiliki rencana yang lebih matang serta mengikuti kondisi yang terjadi saat ini. Lembaga-lembaga baiknya melakukan pengkajian disetiap lembaganya masing-masing untuk mendapatkan rencana dari berbagai sudut pandang masyarakat.

Karena pada tahun 2020 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengeluarkan program bahwa Destinasi pariwisata dan produk pariwisata lainnya harus memiliki sertifikat CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, dan*

Environment Sustainable). Sertifikat CHSE ini adalah Jaminan bahwa Pelaku Usaha Pariwisata, Destinasi Pariwisata, dan Produk Pariwisata lainnya untuk kewajibanya kepada wisatawan terhadap pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada bab IV tentang tingkat kesiapan masyarakat dan strategi penanganan tingkat kesiapan masyarakat dalam Pembangunan Kawasan Wisata Pasir Tuma Desa Mekarsari Kecamatan Cibatu dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Menurut hasil penelitian readiness stage Desa Mekarsari Kecamatan Cibatu Kabupaten Bandung yaitu dimensi yang terkuat pada penelitian ini yaitu Dimensi ini memiliki skor 3.9 merupakan skor tertinggi yang berada pada tahap Initiation pada tahap ini Sedikitnya beberapa Penduduk memainkan peran kunci dan berpartisipasi dalam Pembangunan Kawasan Wisata Pasir Tuma saat ini dan mengembangkan, meningkatkan, serta menerapkan salah satunya dengan menjadi anggota kelompok atau berbicara secara terbuka mendukung upaya, dan/atau menggunakan kekuatan lainnya.
2. Berdasarkan matriks SWOT terlihat bahwa secara internal, kekuatan yang dimiliki lebih besar dibandingkan kelemahannya. Demikian juga dengan peluang yang dimiliki lebih besar dibandingkan ancamannya. Setelah dihitung selisih antara nilai faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan perhitungan selisih faktor eksternal (peluang dan ancaman) maka diperoleh angka 1.59, 1.19, Jika dituangkan dalam diagram analisis SWOT

V. SARAN

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah:

1. Dimensi Kepemimpinan merupakan dimensi dengan Skor paling rendah yaitu 3.4, Peran kepala desa dalam hal pelaksanaan pembangunan Kawasan Wisata Pasir Tuma ini masih belum dilaksanakan dengan baik, dapat dilihat dari 10 responden 70% menjawab dengan skor 3 atau sama dengan cukup berperan. Afek Domino dari tidak adanya informasi yang muncul langsung ke pada masyarakat mengakibatkan masyarakat merasa pihak pemerintahan desa khususnya kepala desa tidak melakukan peranannya dalam hal pembangunan.
2. Dimensi Tingkat dukungan masyarakat terhadap Pembangunan Kawasan Wisata Pasir Tuma yaitu 3.9 dengan responden sebanyak 40% menjawab sangat mendukung dan 40% menjawab

mendukung. Dukungan masyarakat adanya pembangunan kawasan wisata pasirtuma ini, dengan harapan masyarakat dapat mengubah *image* dari kawasan itu juga ingin adanya sumber lahan pendapatan lain yang membuat masyarakat tidak perlu pergi ke luar kota untuk mencari pendapatan.

3. Dalam strategi SWOT untuk Desa Mekarsari diperlukan berbagai inovasi untuk mengoptimalkan waktu dan sumber daya dalam menjalankan semua program agar tepat sasaran sehingga dapat mencapai pada tahap selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Cooper, J. F. (1995). *Tourism, Principles and Practice*. London: Logman.
- [2] DARIAH, A. R. (2009). Peran Perguruan Tinggi dalam Aplikasi Variasi Model. XXV(Peran Perguruan Tinggi).
- [3] Dewi, A. S. (2014). PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) SEBAGAI UPAYA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADes) SERTA MENUMBUHKAN PEREKONOMIAN DESA. V(1).
- [4] Edy Yusuf Agunggunanto, F. A. (2016). PENGEMBANGAN DESA MANDIRI MELALUI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes). XIII(1).
- [5] Elias Wijaya, B. A. (2013). HAMBATAN KESIAPAN MASYARAKAT DESA SEI AHAS DALAM PEMBANGUNAN Canal Blocking PADA RAWA GAMBUT. V(3).
- [6] Eny Boedi Orbawati, S. F. (2020). Village Community Readiness In Establishing A Global Village. XIX(1).
- [7] Fatimah, P. R. (2018). Mengembangkan Kualitas Usaha Milik Desa (Q-BUMDES) untuk Melestarikan Ketahanan Ekonomi Masyarakat dan Kesejahteraan Adaptif: Perancangan Sistem Kewirausahaan Desa dengan Menggunakan Model Tetrapreneur. VII(2).
- [8] Ferdinand Kalesaran, V. V. (2015). PARTISIPASI DALAM PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN KELURAHAN TAAS KOTA MANADO. IV(5).
- [9] I Gde Pitana, P. G. (2005). *Sosiologi pariwisata*. Yogyakarta: ANDI.
- [10] Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUKURAN STATUS PERKEMBANGAN DESA INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TAHUN 2019. (t.thn.).
- [11] KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA NOMOR 030 TAHUN 2016 tentang STATUS KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN DESA. (t.thn.).
- [12] Ni Luh Putu Ayu Diah Puspayanthi, M. A. (2017). PENGUATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN OPTIMALISASI. VIII(Desa).
- [13] Ni'mah A.Hidayah, S. S. (2019). Analisis Peran Stakeholder Dalam Pengembangan Wisata Talang Air Peninggalan Kolonial Belanda Di Kelurahan Pajaresuk Kabupaten Pringsewu. VII(1).
- [14] Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, Tentang Pedoman Pembangunan Desa. (t.thn.).
- [15] PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019. (t.thn.).
- [16] Rahma, A. A. (2020). Potensi Sumber Daya Alam dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata di Indonesia. XII(1).
- [17] Rangkuti, F. (2004). *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka utama.
- [18] Rohim. (2018). PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES). I(1).
- [19] Sri, A. A. (2013). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMOTIVASI PEREMPUAN SEBAGAI PENGELOLA PONDOK WISATA DI KELURAHAN UBUD, KECAMATAN UBUD, KABUPATEN GIANYAR. XIII(1).
- [20] Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [21] Undang-Undang No 12 Tahun 2012 pasal 47, Tentang Pendidikan Tinggi. (t.thn.).
- [22] Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka 6 Tentang Badan Usaha Milik Des. (t.thn.).
- [23] Wilopo, L. H. (2017). STRATEGI PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA BUDAYA. XLI(1).